



PENETAPAN

Nomor 0255/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Amiruddin bin Labennu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon I;

Mira binti Mahmud, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0255/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 16 Februari 2017 di Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. dengan wali nikah adalah Wali Hakim karena ayah Kandung pemohon II tidak bisa hadir, yang dinikahkan oleh Wali

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.0255/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Hakim, bernama Wali Hakim, dengan maskawin berupa cincin Emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bahtiar dan Haeruddin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah setempat;;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

P r i m a i r

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

S u b s i d a i r

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.0255/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta Bermeterai cukup atas nama Pemohon I, Nomor: 731206075730001 tanggal 08 Februari 2018, atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta Bermeterai cukup atas nama Pemohon II, Nomor: 7308192012/SURKET/01/210218/0001 tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Jamaluddin bin Lakude, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. pada 16 Februari 2017;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Hakim karena ayah Kandung pemohon II tidak bisa hadir;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Wali Hakim, ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bahtiar dan Haeruddin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin Emas dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.0255/Pdt.P/2019/PA.Wsp



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Sarifuddin bin Labennu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. pada 16 Februari 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Hakim karena ayah Kandung pemohon II tidak bisa hadir;
- Bahwa yang menikahkan adalah Wali Hakim, ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bahtiar dan Haeruddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin Emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.0255/Pdt.P/2019/PA.Wsp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Tur Lappae, Desa Tototong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng., pada 16 Februari 2017, dengan wali nikah Wali Hakim Pemohon II bernama Wali Hakim karena ayah Kandung pemohon II tidak bisa hadir, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Wali Hakim bernama Wali Hakim, dengan maskawin berupa cincin Emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bahtiar dan Haeruddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Syarifuddin dan Jamaluddin, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.0255/Pdt.P/2019/PA.Wsp



muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 16 Februari 2017 di Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng., dengan wali nikah Wali Hakim karena ayah Kandung pemohon II tidak bisa hadir yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Wali Hakim, dengan maskawin berupa cincin Emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bahtiar dan Haeruddin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.0255/Pdt.P/2019/PA.Wsp



tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Amiruddin bin Labennu dengan Pemohon II Mira binti Mahmud yang dilaksanakan pada 16 Februari 2017 di Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.;
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriah

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.0255/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Andi. Zainuddin sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Hannah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dra. Hj. Hannah

Drs. Andi. Zainuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.0255/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)